



**TAHUN 2025**

# **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN RANCANGAN PERUBAHAN**



**RS JIWA PROF HB SAANIN PADANG**

Jl. Raya Ulu Gadut Padang Telp. (0751) 72001

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Perubahan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Tahun 2025. Pada dasarnya Renja merupakan dokumen Rencana Kerja yang dipakai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan di RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang untuk Tahun Anggaran 2025 dan sebagai dasar penilaian dan evaluasi kinerja, baik kinerja kegiatan maupun kinerja keuangan. Dalam penyusunan Rencana Kerja, RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang mempertimbangkan berbagai permasalahan dan perubahan strategis yang dihadapi oleh Rumah Sakit. Renja ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan yang tepat bagi Rumah Sakit dalam menyesuaikan perubahan kegiatan dan anggaran organisasi khususnya dalam memenuhi kebutuhan dan harapan stakeholder RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang.

Renja RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan Rancangan Teknokratis Rencana Strategis (RENSTRA) RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Tahun 2021-2026 yang bersifat indikatif.

Tidak lupa diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya Renja ini. Perlu disadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renja ini, oleh karena itu masukan serta saran sangat kami harapkan.

Padang, Mei 2025

Direktur

RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang

  
**dr. Aklima, MPH**

NIP. 19680203 200212 2 002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
2.1 Latar Belakang.....	1
2.2 Landasan Hukum .....	4
2.3 Maksud dan Tujuan.....	7
2.4 Sistematika Penulisan .....	7
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 ..	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra SKPD.....	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....	26
2.3 Isu-Isu Penting Dan Catatan Strategis Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Rs Jiwa Prof. HB. Saanin Padang.....	31
2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD .....	40
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	42
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	45
BAB IV PENUTUP .....	52

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **2.1 Latar Belakang**

Upaya peningkatan pelayanan rumah sakit pada dasarnya berkesinambungan dengan perkembangan kebutuhan pelayanan publik, dalam mengatasi peningkatan derajat kesehatan dan pemerataan pelayanan kesehatan yang harus melibatkan berbagai pihak. Rumah Sakit Jiwa sebagai institusi kesehatan harus menerapkan prinsip *clinical governance* dan *corporate governance* yang berfokus kepada kesehatan pasien, pembuktian ilmiah, dan sejalan dengan tindakan profesional. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi rumah sakit perlu memperhatikan tugas klinik dengan prinsip kaidah *clinical governance* dan organisasi rumah sakit yang baik dengan prinsip *good corporate governance* sehingga akan menjadikan rumah sakit yang memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Rencana kerja tahunan SKPD RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang disusun bertujuan untuk mencapai sasaran pelayanan kepada masyarakat sebagai urusan wajib berupa pelayanan kesehatan terutama pelayanan kesehatan rujukan sebagai tugas pokok dan fungsi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Rencana kerja (renja) disusun untuk kegiatan kurun waktu satu tahun dan merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun berdasarkan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran utama sebagai pelaksana pelayanan kesehatan rujukan terutama pelayanan kesehatan jiwa di Provinsi Sumatera Barat.

Proses Penyusunan rencana kerja perubahan tahun 2025 berpedoman kepada Permendagri No 86 Tahun 2017 yaitu Rancangan Renja SKPD provinsi dan kabupaten / kota disusun mengacu pada rancangan awal RKPD; mengacu pada Renstra SKPD; mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya; dan berpedoman kepada Surat Edaran Gubernur Provinsi Sumatera Barat mengenai

Penyusunan Perubahan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah, untuk memecahkan masalah yang dihadapi berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Proses penyusunan Rencana Kerja Perubahan RS Jiwa Prof. HB Saanin Padang Tahun 2025 dengan pembentukan Tim Perumus Renja 2025 bekerja dengan cara: pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan OPD dengan provinsi, mereviu hasil evaluasi Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD, penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD provinsi, penelaahan rancangan awal RKPD provinsi, perumusan tujuan dan sasaran, penelaahan usulan masyarakat, dan perumusan kegiatan prioritas.

Rencana kerja perubahan tahun 2025 RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang mengacu pada RPJMN 2025-2029 berupa tujuh agenda prioritas dengan fokus pada prioritas ketiga meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan strategi pada dimensi Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, melalui pembangunan kesehatan khususnya pelaksanaan program Indonesia Sehat. Kemudian juga berpedoman kepada Prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Selain dari pada itu berpedoman pada Renstra Kementerian Kesehatan RI 2025-2029 dengan Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi - tingginya melalui Program Indonesia Sehat dengan fokus penguatan pelayanan kesehatan melalui Paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan pemantapan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Rencana kerja perubahan 2025 ini juga berpedoman pada Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dengan melanjutkan 2 Program prioritas dengan fokus prioritas pada Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat, yang dijabarkan pada Rencana Strategis (Renstra) RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang 2021-2026 sesuai tugas pokok dan fungsi yaitu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya pelayanan kesehatan jiwa, karena kesehatan jiwa merupakan bagian yang tidak terpisahkan (integral) dari Kesehatan dan unsur utama

dalam menunjang terwujudnya kualitas hidup manusia yang utuh. Sesuai perkembangan yang terjadi saat ini RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang adalah institusi sarana pelayanan kesehatan jiwa yang tidak hanya berfungsi sosial, tetapi telah berkembang menjadi unit pelayanan kesehatan yang harus dapat mengoptimalkan pendapatannya dengan jalan meningkatkan dan mengembangkan jenis-jenis pelayanan yang optimal sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Untuk mencapai tujuan dan melaksanakan fungsi RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, diperlukan perencanaan secara sistematis dan berkesinambungan yang dijabarkan dalam beberapa dokumen perencanaan sesuai waktu pelaksanaannya.

Rencana kerja perubahan RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Tahun 2025 merupakan tahun ke-lima pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2025. Dokumen perencanaan tahunan tersebut digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perubahan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang tahun 2025 ini disusun melalui perencanaan yang bersifat bottom-up. Unit kerja di lingkungan Rumah Sakit sebagai ujung tombak pelayanan, wajib menyusun rencana kegiatan dengan mengembangkan konsep mandiri sehingga kegiatan yang direncanakan disesuaikan dengan prioritas pelayanan dan proyeksi pendapatan yang diperoleh dari masing-masing unit kerja tersebut. Pimpinan selaku pemegang kebijakan memberikan arahan kebijakan dalam menentukan program-program prioritas yang disesuaikan dengan program Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bidang kesehatan dan dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun yaitu selama Tahun 2025.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja perubahan Tahun 2025 ini merupakan proses penyusunan anggaran masing-masing OPD untuk disampaikan dalam RAPBD Perubahan Tahun 2025. Pedoman penyusunan RENJA Perubahan Tahun 2025 juga memperhatikan realisasi program dan kegiatan Tahun 2024 dan proyeksi pencapaian realisasi kegiatan Tahun 2025.

## **2.2 Landasan Hukum**

Dalam penyusunan Rencana Kerja RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Tahun Anggaran 2024, sejumlah peraturan Perundangan, Perda dan pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan RENJA OPD adalah :

1. Undang-undang Nomor: 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor: 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor: 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
5. Undang-undang Nomor: 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002, tentang Pedoman

- susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2011;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata cara Evaluasi Ranperda APBD, Perubahan APBD, Ranperkada Penjabaran APBD, Ranperkada Penjabaran Perubahan APBD;
  17. Permendagri Nomor : 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah Perubahan atas Permendagri Nomor : 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang **Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;**
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah;
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
  23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

24. Instruksi Mendagri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak lanjut PP No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 10 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
30. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Datuak Tan Pari;
31. Peraturan Gubernur No. 43 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemungutan dan Besaran Tarif Jasa Layanan Kesehatan Pada BLUD RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang;
32. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;
33. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Pada Dinas Kesehatan;

34. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
35. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 440-538-2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Jiwa Prof. HB.Saanin Padang Untuk Melaksanakan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ( PPK-BLUD) Secara Penuh;
36. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor: 050/771/XII/P2EPD/Bappeda-2023 tentang Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2025;
37. Surat Edaran Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor: 050/78/IV/P2EPD/Bappeda-2025 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

### **2.3 Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud dan tujuan penyusunan rencana kerja Tahun 2025 RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang adalah untuk mencapai Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Sasaran strategis indikator kinerja utama (IKU) RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang adalah **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Jiwa**. Adapun sasaran tersebut terdiri dari dua indikator kinerja, yaitu:

1. Tingkat Akreditasi Rumah Sakit
2. Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)

### **2.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan pada rencana kerja (renja) perubahan ini adalah sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

##### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan tindak lanjut proses penyusunan RAPBD.

## 1.2 Landasan Hukum.

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lain yang mengatur SOTK, kewenangan OPD dan pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD serta susunan garis besar isi dokumen.

## BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2025 dan Capaian Renstra OPD

Memuat kajian terhadap evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun 2025, perkiraan capaian tahun 2025, kaitan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun lalu.

### 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM maupun IKK.

### 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Menguraikan sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD, juga menguraikan koordinasi dan sinergi program antara OPD Provinsi dengan OPD Kabupaten/Kota serta dengan kementerian atau lembaga di tingkat pusat dalam pencapaian kinerja pembangunan. Permasalahan dan

hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Tupoksi OPD. Dampak pencapaian visi dan misi Kepala daerah terhadap capaian program Nasional/Internasional seperti SPM dan SDGs. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD. Juga formulasi isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

#### 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Memuat uraian proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan alasan proses tersebut dan penjelasan temuan setelah proses review dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

#### 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Memuat uraian kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik kelompok masyarakat, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kabupaten/Kota.

### BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

### BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

**BAB II**  
**EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra SKPD**

**Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra SKPD.**

Indikator kinerja utama (IKU) Renstra RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 s/d Triwulan I

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISAS I (%)	%
1	2	3	4	5
Meningkatnya pelayanan kesehatan jiwa	Tingkat Akreditasi RS	Paripurna	Paripurna	100%
	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	94.91%	Penilaian di TW IV	-
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Non Jiwa menunjang pelayanan Kesehatan jiwa	Persentase Pasien Non Jiwa Yang Ditangani Spesialis	100%	100%	108%
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Evaluasi SAKIP	A (83,77%)	A (Proses Penilaian)	-
Meningkatkan Kemandirian Keuangan RS	Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	48%	9,57%	19.93 %

Indikator Kinerja, target dan realisasi dari sasaran 1 Meningkatnya pelayanan kesehatan jiwa masyarakat sebagai berikut:

**1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Jiwa**

Tujuan meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif bagi seluruh lapisan masyarakat dengan didukung sarana prasarana yang memadai, diwujudkan dengan 2 (dua) sasaran yaitu meraih akreditasi paripurna rumah sakit dan meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

### Sasaran Strategis 1:

Pada sasaran 1 diukur melalui 2 (dua) indikator yaitu:

- a. Tingkat akreditasi Rumah Sakit dan
- b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap seluruh layanan RS.

Indikator Kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam tabel 2 sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
1	Tingkat Akreditasi RS	Paripurna	Paripurna	100%
2	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap seluruh layanan Rumah Sakit	94.91%	Penilaian di TW IV	-

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran tabel 2, dapat disimpulkan bahwa meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan jiwa di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang pada semester I tahun 2025. Dari 2 (dua) indikator kinerja pada sasaran 1 (satu), 1 indikator diatas sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, sedangkan untuk indikator indeks kepuasan masyarakat belum mendapatkan penilaian karena penilaian biasanya dilakukan di triwulan IV.

Selanjutnya capaian masing masing indikator dijelaskan pada uraian sebagai berikut:

#### a. Tingkat Akreditasi Rumah Sakit

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Dalam memberikan pelayanan, rumah sakit harus memperhatikan mutu dan keselamatan pasien. Pelayanan kesehatan yang bermutu adalah pelayanan yang memiliki karakter aman, tepat waktu, efisien, efektif, berorientasi pada

pasien, adil dan terintegrasi. Pemenuhan mutu pelayanan di rumah sakit dilakukan dengan dua cara yaitu peningkatan mutu secara internal dan peningkatan mutu secara eksternal.

Peningkatan Mutu Eksternal (*External Continuous Quality Improvement*) merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu pelayanan di rumah sakit secara keseluruhan. Beberapa kegiatan yang termasuk peningkatan mutu eksternal adalah perizinan, sertifikasi, dan akreditasi.

Akreditasi adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan rumah sakit setelah dilakukan penilaian bahwa rumah sakit telah memenuhi standar akreditasi yang disetujui oleh Pemerintah.

Hasil akreditasi berdasarkan pemenuhan standar akreditasi menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah sakit dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

<b>Hasil Akreditasi</b>	<b>Kriteria</b>
Paripurna	Seluruh Bab mendapat nilai minimal 80%
Utama	12 – 15 Bab mendapat nilai 80% dan Bab SKP mendapat nilai minimal 80%. Untuk rumah sakit selain rumah sakit pendidikan/wahana Pendidikan maka kelulusan adalah 12 -14 bab dan bab SKP minimal 80%
Madya	8 sampai 11 Bab mendapat nilai minimal 80% dan Bab SKP mendapat nilai minimal 70%
Tidak terakreditasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kurang dari 8 Bab yang mendapat nilai minimal 80%; dan/atau</li> <li>b. Bab SKP mendapat nilai kurang dari 70%</li> </ul>

*Sumber* : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022

Realisasi Tingkat Akreditasi RS tahun 2022 adalah Paripurna, akreditasi ini berlaku selama 5 tahun. Bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan Paripurna, maka dapat diketahui persentase capaian Tingkat Akreditasi RS tahun 2022 adalah sebesar 100%, ini berarti skala penilaiannya Sangat Baik. Bila dibandingkan dengan capaian akreditasi RS yang didapatkan oleh RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang tahun 2019 adalah

Dasar, tahun 2022 terdapat peningkatan dari tahun 2019. Bila dibandingkan dengan target skala nasional, pencapaian akreditasi RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang sudah berada pencapaian tertinggi. Dibandingkan dengan pencapaian akreditasi untuk RS. Jiwa sejenis/sekelas yaitu RS. Jiwa Tampan Provinsi Riau tahun 2021, RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang berada diatas RS. Jiwa tersebut.

Bila dibandingkan dengan Tingkat Akreditasi RS tahun sebelumnya dapat dilihat dari tabel 3 dibawah ini:

**Tabel 3. Pengukuran Kinerja Sasaran  
Tingkat Akreditasi Rumah Sakit**

No	Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024	
		Trgt	Rea	Trgt	Rea	Trgt	Rea	Trgt	Rea
1	Tingkat Akreditasi RS	Utama	Dasar	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna

*Sumber Data: LAKIP RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang 2022-2024*

Tabel 3 diatas menunjukkan bahwa realisasi Tingkat Akreditasi Rumah Sakit Tahun 2024 tetap mempertahankan tingkat akreditasi paripurna. Hal ini disebabkan karena:

- a. Komitmen seluruh pegawai RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dalam meningkatkan pelayanan dan mengembangkan inovasi-inovasi layanan.
- b. Integritas dari manajemen RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dalam menerapkan kebijakan yang mendukung suksesnya akreditasi.
- c. Besarnya dukungan dari *stakeholder* pengampu yang memberikan kontribusi terhadap suksesnya akreditasi.
- d. Untuk mempertahankan capaian tersebut RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang selalu melakukan upaya antara lain:
- e. Menerapkan standar pelayanan yang berkualitas dengan mengedepankan keselamatan dan kepuasan masyarakat/pasien.
- f. Melakukan inovasi-inovasi pengembangan layanan sesuai dengan perkembangan regulasi dan teknologi.
- g. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan *Stakeholder* pengampu kebijakan.

- h. Melakukan pengembangan Sumber Daya Manusia yang berkualitas sesuai dengan kompetensi dan regulasi.
- i. Mengembangkan sarana dan prasarana sesuai dengan standar pelayanan dengan memperhatikan *update* teknologi.

**b. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap seluruh layanan Rumah Sakit**

Kepuasan masyarakat terhadap seluruh 9 (sembilan) kelompok ruang lingkup unsur pelayanan di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dengan 18 elemen indeks kepuasan yang sudah ditetapkan Kemenpan dapat diukur dengan melakukan survey kepuasan oleh Bidang Diklat dan Litbang RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang yang dilakukan rutin setiap tahunnya.

Survey indeks kepuasan masyarakat dilakukan untuk mengukur sejauh mana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit. Untuk menjaga hasil survey tetap valid, pihak rumah sakit menyerahkan pelaksanaan survey kepada pihak yang independen dalam hal ini diluar RS. Pada tahun 2023 ini survey dilakukan oleh LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) Universitas Andalas Padang.

Untuk realisasi IKM 2025 belum final dan dalam proses penilaian. Sedangkan Realisasi IKM tahun 2024 adalah 94,91%. Bila dibandingkan dengan target nilai IKM RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang yang telah ditetapkan untuk tahun 2024 (93.33%), maka dapat diketahui persentase capaian IKM tahun 2024 adalah sebesar 102%, ini berarti dalam skala penilaian Sangat Baik. Secara Nasional berdasarkan Permenpan & RB RI No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, nilai IKM RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang termasuk pada rentang nilai 88,31 – 100 dengan kategori Sangat Baik.

Pada tahun 2024 penilaian IKM dilakukan satu periode, yang dilakukan oleh lembaga independen (eksternal) dengan hasil rata rata 94,91%.

Jika dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini:

Tabel 4 Pengukuran Indikator Kinerja: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)									
NO	Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024	
		Trgt	Real	Trgt	Real	Trgt	Real	Trgt	Real
	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	90,18	90	91,98	90	93,33	93,33	94,91

Trend Perkembangan Nilai IKM dalam kurun waktu 4 tahun terakhir dapat digambarkan pada grafik sebagai berikut.



Grafik diatas menunjukkan bahwa nilai IKM tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun 2023. Kenaikan tersebut salah satunya di latar belakang oleh peningkatan kualitas pelayanan sehingga mendapat respon positif dari masyarakat.

Pencapaian IKM tahun 2024 dengan kategori Sangat Baik sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh rumah sakit diantaranya:

- a. Peningkatan SDM melalui Pendidikan, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis dengan biaya yang dianggarkan sebesar Rp. 246.150.000 yang berasal dari dana RBA BLUD.
- b. Peningkatan sarana prasarana yang menunjang pelayanan dan pengembangan layanan RS sehingga dapat diakses lebih mudah oleh Masyarakat. Biaya yang dianggarkan dengan total sebesar Rp. 3.275.602.000 yang berasal dari Belanja RBA BLUD Rp. 1.620.943.000, DAK Rp. 1.531.482.053, dan dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp. 123.176.947.
- c. Pemberian informasi secara kontinyu kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung (leaflet, barner, running Teks, media cetak

maupun elektronik). Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut Rp. 95.234.000,- bersumber dari dana RBA BLUD.

- d. Peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat dengan menyediakan ruangan pengaduan dan memperbanyak kotak pengaduan, sehingga masyarakat dapat menyampaikan keluhannya.

Setelah dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat Pada RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, terdapat 3 unsur terendah dan berada pada ruang lingkup Perilaku Pelaksana (unsur ke-7) terutama pada butir pertanyaan Kesopanan dan Keramahan Petugas, Unsur Kompetensi Petugas (unsur ke-6) terutama pada butir pertanyaan Cara Komunikasi Petugas dalam Proses Pelayanan dan Unsur Sarana Prasarana (unsur ke-9) terutama pada butir pertanyaan Ketersediaan Prasarana Penunjang Pelayanan.

Adapun rekomendasi perbaikan terhadap unsur tersebut sebagai berikut:

- a. Mengadakan Pelatihan *excellent service* untuk lebih meningkatkan kesopanan, keramahan dan cara komunikasi yang baik dalam proses pemberian layanan
- b. Mengganti lampu toilet perempuan agar lebih terang yang ada Premium Wings
- c. Memperbaiki pintu toilet perempuan agar bisa di kunci di ada Premium Wings
- d. Meningkatkan kinerja cleaning service untuk membersihkan Toilet perempuan secara berkala.
- e. Memperbaiki kran air pada Toilet pria di Premium Wings
- f. Ada petugas yang dapat mengarahkan lokasi parkir agar tidak memakai badan jalan dan mengganggu akses ke pintu utama layanan

## **2. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Non Jiwa yang Menunjang Pelayanan Kesehatan Jiwa**

Tujuan meningkatkan pelayanan kesehatan non jiwa yang menunjang pelayanan kesehatan jiwa prima meliputi upaya kesehatan diluar psikiatri

(Penyakit dalam, Syaraf, Anak, Gigi/Mulut dan Rehabilitasi Medik) baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif bagi seluruh lapisan masyarakat dengan didukung sarana prasarana yang memadai, diwujudkan dengan 1 (satu) sasaran yaitu meningkatnya pelayanan kesehatan non jiwa yang menunjang pelayanan kesehatan jiwa prima.

Sasaran tersebut diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu: Persentase (%) pasien non jiwa yang ditangani spesialis.

TUJUAN 1	SASARAN 1
Meningkatnya Derajat Kesehatan perorangan	Meningkatnya pelayanan kesehatan non jiwa yang mendukung pelayanan kesehatan jiwa prima

Indikator Kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam tabel 5 dibawah:

<b>TABEL. 5</b>	<b>Pengukuran Kinerja Sasaran:</b> Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Spesialis Non Jiwa yang Menunjang Pelayanan Kesehatan Jiwa
-----------------	---

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
1	Persentase (%) pasien non jiwa yang ditangani spesialis	100%	100%	100%

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 1, menunjukkan bahwa realisasi pelayanan kesehatan non jiwa yang menunjang pelayanan kesehatan jiwa prima di RS. Jiwa Prof. HB.Saanin Padang pada semester I tahun 2025 adalah 100% dan dalam skala pengukuran kategori **Sangat Baik**.

Dari 1 (satu) indikator kinerja pada sasaran 2 (dua): hasilnya mencapai target yang telah ditetapkan. Selanjutnya capaian indikator dijelaskan pada uraian sebagai berikut:

### **Persentase (%) pasien non jiwa yang ditangani spesialis**

Persentase (%) pasien non jiwa yang ditangani spesialis adalah jumlah pasien non psikiatri (penyakit dalam, penyakit syaraf, anak, dan pelayanan

gigi) yang ditangani oleh dokter spesialis dibanding dengan jumlah pasien non psikiatri yang datang berobat x 100.

Realisasi Persentase (%) pasien non jiwa yang ditangani spesialis tahun 2024 adalah 100%. Bila dibandingkan dengan target Persentase (%) pasien non jiwa yang ditangani spesialis di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang yang telah ditetapkan (100%), ini berarti dalam skala penilaian **Sangat Baik**.

Jika dibandingkan dengan Persentase (%) pasien non jiwa yang ditangani spesialis tahun sebelumnya dapat dilihat dari table 6 dibawah ini:

Tabel. 6		Pengukuran Indikator Kinerja: Persentase (%) pasien non jiwa yang ditangani spesialis									
		2021		2022		2023		2024		2025	
No	Indikator Kinerja	Trgt	Real	Trgt	Real	Trgt	Real	Trgt	Real	Trgt	Real
1	Persentase (%) pasien non jiwa yang ditangani spesialis	90	98,91	90	100	92	100	100	100	100	100

Trend Perkembangan Persentase (%) pasien non jiwa yang ditangani spesialis dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat digambarkan pada grafik sebagai berikut.



Grafik diatas menunjukkan hasil persentase (%) pasien non jiwa yang ditangani spesialis sampai tahun 2025. Realisasi yang diraih 100% artinya seluruh pasien non jiwa ditangani oleh dokter spesialis. Keberhasilan ini disebabkan karena adanya kebijakan dari RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang untuk Penambahan Pelayanan Non Jiwa di luar Pelayanan Jiwa yang dilayani oleh dokter spesialis seperti Spesialis Penyakit dalam, Spesialis Syaraf dan Anak. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 2021-2026 yaitu sebesar 93%, pencapaian Tahun 2025 melebihi target Renstra dengan selisih sebesar 7%.

Pencapaian Persentase (%) pasien non jiwa yang ditangani spesialis tahun 2025 dengan kategori Sangat Baik sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh rumah sakit diantaranya pengembangan pelayanan Non Jiwa di luar pelayanan jiwa yang dilayani oleh dokter spesialis seperti Spesialis Penyakit dalam, Spesialis Syaraf dan Anak.

### 3. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi

Tujuan Meningkatnya Tata Kelola Organisasi menggambarkan kemampuan RS dalam melaksanakan tata kelola RS dan membiayai seluruh pengeluaran baik operasional maupun investasi dengan dana yang bersumber dari pendapatan RS, kemampuan dalam mengelola SDM dan tata kelola RS. Tujuan kedua dapat diukur dengan 2 sasaran yaitu:

- a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi
- b. Meningkatnya Kemandirian Keuangan RS

#### Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi.

Pada sasaran 1 diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu: Nilai Evaluasi SAKIP SKPD.

Tujuan	Sasaran 1
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Indikator Kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam tabel 7 sebagai berikut:

Tabel. 7		Pengukuran Kinerja Sasaran: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi		
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	BB (82,35)	A (83,77)	102%

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 1 tabel 7 dapat disimpulkan bahwa meningkatnya tata kelola di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang pada Tahun 20234 berdasarkan Nilai SAKIP sebesar 102% dan dalam skala pengukuran kategori Sangat Baik.

## Nilai Evaluasi SAKIP SKPD

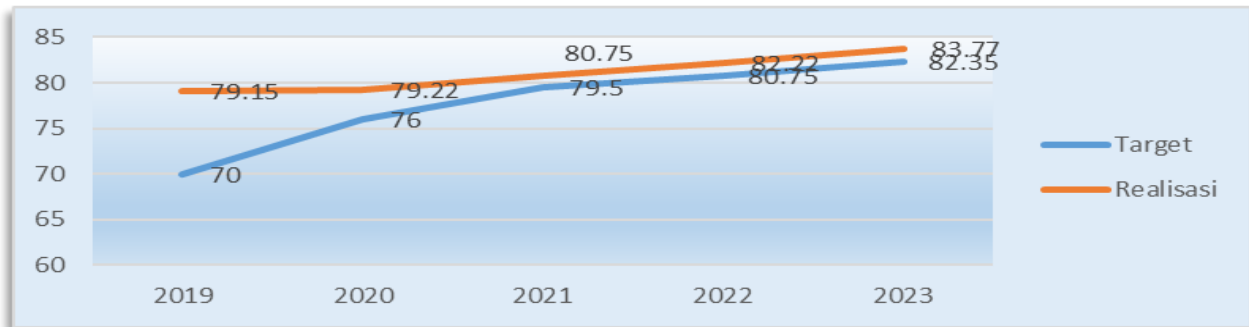
Penilaian Evaluasi SAKIP SKPD merupakan penilaian akuntabilitas kinerja RS. Jiwa Prof.HB. Saanin Padang yang dievaluasi setiap tahunnya. Penilaian akuntabilitas kinerja SKPD dinilai oleh Inspektorat dan dilaporkan dalam bentuk hasil penilaian atas kinerja organisasi dan kinerja keuangan organisasi. Bentuk akhir dari SAKIP adalah dalam bentuk laporan kinerja yaitu LAKIP.

Dalam penilaian LAKIP ini materi yang dievaluasi meliputi 5 komponen: Komponen pertama adalah perencanaan kinerja yang terdiri dari renstra, rencana kinerja tahunan dan perjanjian kinerja. Komponen kedua adalah pengukuran kinerja yang meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran dan implementasi pengukuran. Komponen ketiga adalah pelaporan kinerja yang terdiri dari pemenuhan pelaporan, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan informasi kinerja. Komponen ke empat adalah evaluasi kinerja yang terdiri dari pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi dan pemanfaatan evaluasi dan komponen kelima adalah pencapaian kinerja terdiri dari kinerja yang dilaporkan dan kinerja lainnya.

Realisasi SAKIP tahun 2024 merupakan hasil penilaian dari LAKIP Tahun 2023 dengan nilai capaian A (83.77). Bila dibandingkan dengan target nilai LAKIP RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang yang telah ditetapkan A (82,35), maka dapat diketahui persentase capaian nilai LAKIP Tahun 2024 adalah sebesar 102%, ini berarti dalam skala penilaian Sangat Baik. Realisasi nilai LAKIP tahun 2019–2023 dapat dilihat dari tabel 8 dibawah ini:

No	Indikator Kinerja	2019		2020		2021		2022		2023	
		Trgt	Real	Trgt	Real	Trgt	Real	Trgt	Real	Trgt	Real
	Nilai Evaluasi Sakip SKPD	70	79,15	76	79,22	79,5	80,75	80,75	82.35	82,35	83.77

Perkembangan Nilai LAKIP dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat digambarkan pada grafik sebagai berikut.



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa nilai LAKIP mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yang pada tahun 2023 berada pada kategori A dengan nilai 83,77.

Pencapaian LAKIP pada tahun 2023 dengan kategori **Sangat Baik** sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh manajemen rumah sakit diantaranya:

- a. Melibatkan semua unsur bidang/bagian untuk terlibat dalam perencanaan sehingga perencanaan menjadi suatu acuan yang disepakati bersama untuk dilaksanakan.
- b. Melakukan pengendalian dan evaluasi capaian kinerja untuk setiap triwulan sehingga dapat diantisipasi segala kendala dengan cepat.
- c. Melakukan pengukuran terhadap kinerja eselon II, III, IV dan staf.
- d. Eselon II, III dan IV membuat rencana aksi setiap triwulan.
- e. Melakukan pelaporan capaian kinerja melalui e-SAKIP REVIU ([esr.menpan.go.id](http://esr.menpan.go.id)).
- f. Mengirimkan laporan setiap triwulan ke biro organisasi

Untuk peningkatan penilaian LAKIP dimasa yang akan datang diperlukan:

- a. Pengembangan IT dalam perjanjian dan pengukuran kinerja dengan menggunakan aplikasi yang bernama SIPOLIN (Sistem Pengukuran Kinerja Online).
- b. Melakukan revisi perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja dari eselon II, III, IV dan staf sehingga sasaran, indikator, dan target sudah memiliki hubungan kausalitas dan *breakdown* dari atasan.

- c. Membuat pelaporan PK dan Rencana Aksi setiap triwulan yang laporannya disampaikan ke Biro Organisasi.
- d. Tahun 2024 SIPOLIN (Sistem Pengukuran Kinerja Online) yang merupakan sistem pendukung dalam pengukuran kinerja pegawai berhasil masuk ke dalam salah satu inovasi daerah provinsi Sumatera Barat yang diusulkan oleh RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang.

#### 4. Meningkatkan Kemandirian Keuangan Rumah Sakit

Tujuan Meningkatnya kemandirian Rumah Sakit menggambarkan kemampuan RS dalam melaksanakan tata kelola RS dan membiayai seluruh pengeluaran baik operasional maupun investasi dengan dana yang bersumber dari pendapatan RS, kemampuan dalam mengelola SDM dan tata kelola RS. Tujuan kedua dapat diukur dengan 2 sasaran yaitu:

##### Sasaran: Meningkatkan kemandirian keuangan RS

Pada sasaran 1 diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu: Tingkat Kemandirian Keuangan RS (TKK)

TUJUAN 1	SASARAN 1
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Rumah sakit

Sumber Data: RENSTRA RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang 2021-2026

Indikator Kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam tabel 9 sebagai berikut:

TABEL 9		Pengukuran Kinerja Sasaran: Meningkatnya Kemandirian Keuangan Rumah sakit (TKK)		
NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
1	Tingkat Kemandirian Keuangan RS (TKK)	48,62%	43,48%	89.42%

Sumber Data: PK RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang 2024

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 1 tabel 9 dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian keuangan di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang pada Tahun 2024 berdasarkan realisasi capaian sebesar 89.42%.

Selanjutnya capaian indikator dijelaskan pada uraian sebagai berikut:

### **Tingkat Kemandirian Keuangan RS (TKK)**

Tingkat Kemandirian Keuangan merupakan salah satu indikator kinerja keuangan rumah sakit. Indikator ini menggambarkan kemampuan RS membiayai seluruh biaya rumah sakit, dari pendapatan murni rumah sakit.

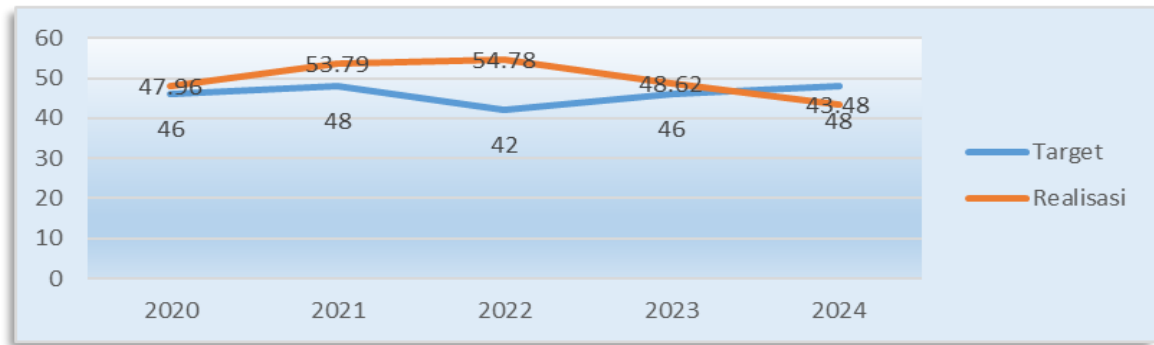
TKK adalah nilai dalam persen yang menunjukkan seberapa besar kemampuan RS menutupi biaya (*Cost*) dibandingkan dengan penerimaan dari pendapatan pelayanan pasien (*Revenue*). TKK dihitung dari persentase perbandingan antara total pendapatan dengan total biaya belanja rumah sakit dengan nilai idealnya diatas 40%.

Realisasi TKK Tahun 2024 sebesar 43,48%, hal ini menunjukkan persentase capaian TKK Tahun 2024 adalah sebesar 43,48% dari target yang ditetapkan sebesar 48,62%. Dengan skala penilaian Baik. Jika dibandingkan dengan TKK secara nasional adalah minimal 40%, TKK RS Jiwa Prof HB Saanin sudah berada pada rentang diatas Standar Minimal Nasional.

TKK merupakan indikator yang baru diperhitungkan mulai tahun 2016, namun demikian pada laporan ini sebagai pembanding tingkat capaian dapat kita lihat pada tabel berikut:

<b>Tabel. 10</b>	<b>Pengukuran Indikator Kinerja: Persentase (%) TKK</b>									
	<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>		<b>2023</b>		<b>2024</b>	
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Trgt</b>	<b>Real</b>	<b>Trgt</b>	<b>Real</b>	<b>Trgt</b>	<b>Real</b>	<b>Trgt</b>	<b>Real</b>	<b>Trgt</b>	<b>Real</b>
<i>Tingkat Kemandirian Keuangan (TKK)</i>	46	47,96	48	53,79	42	57,46	46	48,62	48	43,48

Trend Perkembangan TKK dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat digambarkan pada grafik sebagai berikut.



Grafik diatas menunjukkan TKK dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, dimana TKK RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang berada selalu diatas kisaran 40%. Pada tahun 2024 tingkat kemandirian keuangan rumah sakit sebesar 43,48%.

Pencapaian TKK tahun 2024 dengan kategori Baik didukung oleh Pendapatan RS, Belanja APBD dan Belanja BLUD, diantaranya:

1. Target pendapatan tahun 2024 sebesar Rp. 27.500.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 28.881.383.290,- dengan persentase pencapaian 105%.
2. Belanja APBD dimana target belanja APBD sebesar Rp. 38.690.372.284,- terealisasi sebesar Rp. 36.647.619.942,- dengan persentase realisasi sebesar 94,71%. Kegiatannya diantaranya Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah (Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN), Penyediaan fasilitas pelayanan sarana, prasarana dan alat kesehatan dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan) yang terdiri dari sumber dana DAK dan DBHCHT.
3. Belanja BLUD 2024 dengan target belanja Rp. 30.172.093.079,- dan realisasi sebesar Rp. 29.767.863.189, dengan persentase capaian 98,7%, kegiatannya adalah peningkatan pelayanan BLUD RS.
4. Total Pendapatan BLUD pada tahun 2024 adalah Rp. 28.881.383.290,- dan Total pengeluaran BLUD ditambah APBD adalah Rp. 66.415.483.131

Tantangan yang dihadapi untuk mencapai target TKK di antaranya adalah adanya penurunan pendapatan pada tahun 2024 dan potensi penurunan lanjutan pada tahun 2025. Hal ini disebabkan oleh beberapa

faktor eksternal, seperti sudah beroperasinya Rumah Sakit Jiwa Kelas C di Kota Padang yang telah menjalin kerja sama dengan BPJS, serta RSUD Kelas C di berbagai kabupaten/kota yang kini juga menyediakan layanan jiwa, baik rawat inap maupun rawat jalan. Selain itu, sistem rujukan berjenjang yang masih diberlakukan mewajibkan pasien untuk melalui fasilitas kesehatan tingkat D, C, B, dan A sebelum sampai ke rumah sakit jiwa, yang memperlambat akses layanan.

Kebijakan BPJS Kesehatan juga memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan pendapatan. Salah satunya adalah kewajiban verifikasi wajah melalui Face Recognition Integrated System Hospital (FRISTA) dan fingerprint bagi pasien yang datang ke poliklinik rumah sakit jiwa. Proses ini menyulitkan keluarga untuk membawa pasien dengan gangguan jiwa, terutama yang berasal dari luar kota. Ditambah lagi, adanya pembatasan layanan untuk pasien kronis jiwa yang hanya diperbolehkan melakukan satu kali kunjungan dalam sebulan, tentu sangat membatasi intensitas layanan dan klaim yang bisa diajukan.

Kebijakan iterasi dari BPJS yang memperbolehkan pengambilan obat di apotek tanpa harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter psikiater turut menurunkan nilai klaim dari rumah sakit. Hal serupa juga terjadi pada layanan rehabilitasi medik, di mana BPJS hanya membayarkan klaim apabila layanan diberikan langsung oleh dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi (Sp.KFR), padahal dalam praktiknya banyak layanan yang dapat dilakukan oleh terapis. Kondisi ini menyebabkan selisih biaya operasional dan pendapatan yang cukup signifikan.

Selain hambatan kebijakan, faktor sosial juga turut mempengaruhi pencapaian target TKK. Stigma negatif terhadap gangguan jiwa di masyarakat masih sangat tinggi, sehingga minat masyarakat untuk memanfaatkan layanan rumah sakit jiwa, khususnya layanan non-jiwa seperti poliklinik umum, gigi, dan rehabilitasi medik, masih rendah. Hal ini semakin mempersempit peluang rumah sakit jiwa untuk memperluas cakupan layanan dan meningkatkan pendapatan di luar layanan kejiwaan.

Pada tahun 2024 RS Jiwa Prof. HB. Saanin sudah melampaui kinerja keuangan yang baik, kedepannya tentu kinerja tersebut harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan. Beberapa hal yang dapat ditingkatkan adalah:

1. Melakukan efisiensi terhadap belanja BLUD RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang agar dapat memenuhi target belanja.
2. Meningkatkan layanan pasien jiwa maupun non jiwa dengan memberdayakan tenaga dan sumber daya yang ada di rumah sakit
3. Meningkatkan promosi dan edukasi kepada masyarakat mengenai layanan kesehatan khususnya layanan kesehatan jiwa

Efisiensi Anggaran yang dilakukan Rumah Sakit RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang:

1. Melakukan efisiensi belanja APBD dan BLUD.
2. Melakukan pengembalian potensi kebijakan pembayaran gaji dan TPP.
3. Melakukan efisiensi pada belanja bahan habis pakai dan efisiensi hasil tender dan pengadaan lainnya.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

### **a. Pelayanan Gawat Darurat:**

Dari 9 Indikator SPM, semua indikator sudah mencapai target.

### **b. Pelayanan Rawat Jalan;**

Dari 6 indikator SPM, semua indikator sudah mencapai target.

### **c. Pelayanan Rawat Inap**

Dari 13 indikator SPM, 11 indikator memenuhi target SPM, sedangkan 2 indikator belum memenuhi target SPM yaitu:

- 1) Kejadian adanya kejadian rawat ulang (re-admission) pasien gangguan jiwa dalam waktu  $\leq 1$  bulan

Tidak adanya kejadian rawat ulang (re-admission) pasien gangguan jiwa dalam waktu  $\leq 1$  bulan 92,3% dari target 100%. Hal ini disebabkan Indikator ini belum tercapai karena masih tingginya tingkat ketergantungan keluarga pada perawatan di rumah sakit. Keluarga merasa belum mampu merawat pasien dirumah karena kesibukan atau tidak adanya yang mengawasi pasien selama di rumah.

- 2) Lama hari perawatan pasien gangguan jiwa standarnya adalah  $\leq 6$  minggu, pencapaian hanya 98,17% dari target. Penyebabnya adalah masih adanya keluarga yang belum bisa menjemput pasien setelahizinkan pulang oleh dokter, walaupun perawat di ruangan dan case manager telah menghubungi keluarga berulang kali. Selain itu, perawatan pasien dari rekomendasi Dinsos sering di dropping karena tidak ada keluarga (pasien terlantar)

**d. Pelayanan Rehabilitasi Mental**

Dari 4 Indikator SPM, semua Indikator sudah mencapai target.

**e. Pelayanan Psikologi**

Dari 5 Indikator SPM, semua indikator sudah mencapai target.

**f. Pelayanan Forensik Psikiater**

Dari 5 Indikator SPM, semua indikator sudah mencapai target.

**g. Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat**

Dari 2 Indikator SPM, semua indikator sudah mencapai target.

**h. Pelayanan Radiologi,**

Dari 4 Indikator SPM, semua indikator sudah mencapai target.

**i. Pelayanan Laboratorium,**

Dari 4 Indikator SPM, semua indikator sudah mencapai target.

**j. Pelayanan Farmasi,**

Dari 4 indikator SPM, semua indikator sudah mencapai target.

**k. Pelayanan Gizi,**

Dari 3 indikator SPM, semua indikator sudah mencapai target.

**l. Pelayanan Rekam Medis,**

Dari 4 indikator SPM, semua indikator terpenuhi target.

**m. Pelayanan pengelolaan limbah,**

Dari 2 indikator SPM, semua indikator memenuhi target.

**n. Pelayanan administrasi dan manajemen,**

Dari 9 indikator SPM, 9 indikator sudah memenuhi target SPM.

**o. Pelayanan ambulance/kereta jenazah**

Dari 2 indikator SPM, semua indikator memenuhi target SPM.

**p. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah**

Dari 1 indikator SPM, semua indikator memenuhi target SPM.

**q. Pelayanan laundry,**

Dari 2 indikator SPM, semua indikator memenuhi target SPM.

**r. Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit,**

Dari 3 indikator SPM, 2 (dua) indikator sudah memenuhi target SPM, dan 1 (satu) indikator belum memenuhi standar SPM. Ketetapan waktu pemeliharaan alat sebesar dicapai sebesar 99% dari target 100%. Hal ini disebabkan adanya spare part perbaikan alat pada bulan Agustus habis (bola lampu, stop kontak dan steker).

**s. Pencegahan dan pengendalian infeksi,**

Dari 3 indikator SPM, semua indikator memenuhi target SPM. Analisis kinerja pelayanan RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam pelayanan kesehatan terhadap masyarakat Provinsi Sumatera Barat terutama dalam pelayanan kesehatan jiwa, sesuai dengan indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam Renstra 2021-2026, telah dapat dicapai dengan baik seperti terlihat pada Tabel 11. Pencapaian Kinerja Pelayanan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 11. Capaian Kinerja Pelayanan RS Jiwa Prof HB Saanin Padang

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK (PP 6/2008)	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025 (TW 1)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	BOR ( Bed Occupancy Rate)	60-85 %	65%	87%	65%	65%	66%	67%	59.49%	64.00%	69.74%	69.00%	72.21%
2.	LOS ( Length Of Stay )	30-52 Hari	40 Hari	42 hari	42 hari	32 Hari	32 Hari	32 Hari	24,28 Hari	24,16 Hari	27 Hari	25 Hari	27.21 Hari
3.	BTO ( Bed Turn Over )	3-4 kali	3 Kali	4 kali	4 kali	10 Kali	10 kali	10 kali	8,79 Kali	9,47 Kali	10 Kali	10 Kali	2.42 kali
4.	TOI ( Turn Over Interval )	1-3 hari	1 Hari	6 hari	6 hari	8 hari	8 hari	8 hari	16,82 Hari	14 Hari	11 Hari	11 Hari	10.33 Hari
5.	NDR ( Net Death Rate )	-	-	0.24%	0.24%	0.24%	0.24%	0.24%	0.42%	0.08%	0.12%	0.15%	0.30%
6.	GDR ( Gross Death Rate )	-	-	0.24%	0.24%	0.45%	0.45%	0.45%	0.55%	0.32%	0.27%	0.18%	0.30%
7	Jumlah Pasien Masuk	-	-	2.100 org	2.100 org	2.100 org	2.550 org	2.560 org	2,385	2,564 org	2558 org	2675 org	642 org
8	Jumlah Pasien Rawat Inap	-	-	2.150 org	2.150 org	2.150 org	2.750 org	2.760 org	2,515	2.724 org	2750 org	2835 org	802 org
9	Jumlah Kunjungan Pasien ( KP ) Rawat Jalar	-	-	30.000 org	30.000 org	30.000 org	25.600 org	25.600 org	29,519	30,606 org	28911 org	25595 org	5966 org
10	Akreditasi Standard Pelayanan RS/ISO			Terakreditasi	Terakreditasi	Terakreditasi	Terakreditasi	Terakreditasi	Terakreditasi	Terakreditasi	Terakreditasi	Terakreditasi	Terakreditasi

Berdasarkan tabel diatas pada umumnya indikator utama kinerja pelayanan pada RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang telah memenuhi target.

### **2.3 Isu-Isu Penting Dan Catatan Strategis Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Rs Jiwa Prof. HB. Saanin Padang**

#### **a. Tingkat Kinerja RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang**

Kinerja pelayanan RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Tahun 2025 seperti terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 12. Capaian Kinerja Pelayanan Triwulan 1 Tahun 2025  
RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang**

Indikator	Tahun 2025 (TW 1)	
	Target	Realisasi
BOR	67%	72,21%
AVLOS	32 hari	27,21 hari
BTO	10 kali	2,42 hari
TOI	8 hari	10,33 hari
NDR	0.24%	0,30%
GDR	0.45%	0.30%
Jumlah Pasien Masuk	2.560 org	642 org
Kunjungan Rawat Jalan	25.600 org	5.966 org
Kunjungan Rawat Inap	2.760 org	802 org

Tabel diatas menampilkan realisasi pelayanan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang sampai dengan triwulan 1 tahun tahun 2025. Kendala yang dihadapi dalam mencapai target diatas adalah rujukan online berjenjang dari BPJS yang mengakibatkan turunnya pendapatan RS. Selanjutnya untuk capaian kinerja keuangan dalam hal ini realisasi pendapatan pelayanan RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 13. Realisasi Pendapatan Sampai Bulan Maret 2025 (TW 1)**

JENIS PENERIMAAN	TARGET TAHUN 2025	REALISASI S/D MARET 2025	%
<b>RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN di RUMAH SAKIT UMUM DAERAH</b>			
INSTALASI FARMASI	2,294,500,000	480,008,891	20.92%
INSTALASI GAWAT DARURAT	73,500,000	1,615,000	2.20%
INSTALASI NAPZA	1,100,000,000	39,810,000	3.62%
INSTALASI NON JIWA	600,000,000	895,594,820	149.27%
INSTALASI RAWAT INAP	13,759,950,000	3,094,625,688	22.49%
INSTALASI RAWAT JALAN	10,165,050,000	1,691,592,640	16.64%
<b>JUMLAH</b>	<b>27,993,000,000</b>	<b>6,203,247,039</b>	<b>22.16%</b>
<b>PENDAPATAN BLUD dari HASIL KERJASAMA dengan PIHAK LAIN</b>			
ASET / UMUM	52,500,000	33,200,000	63.24%
DIKLAT	787,500,000	196,540,000	24.96%
<b>JUMLAH</b>	<b>840,000,000</b>	<b>229,740,000</b>	<b>27.35%</b>
<b>PENDAPATAN BLUD dari JASA GIRO</b>			
KEUANGAN	42,000,000	6,283,350	14.96%
<b>JUMLAH</b>	<b>42,000,000</b>	<b>6,283,350</b>	<b>14.96%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>28,875,000,000</b>	<b>6,439,270,389</b>	<b>22.30%</b>

Secara umum pendapatan pelayanan RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang sampai bulan Maret 2025 dengan target Rp. 28.875.000.000 terealisasi sebesar Rp. 6.439.270.389 dengan pencapaian sebesar 22.30%.

#### **b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi RS Jiwa Prof. Hb. Saanin Padang**

Permasalahan yang menghambat peningkatan kinerja pelayanan dan keuangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang antara lain:

1. Kurangnya Dokter Spesialis baik Jiwa dan Non jiwa sehingga masih harus referal ke RS M. Djamil Padang
2. Terbatasnya anggaran pelatihan SDM
3. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan yang belum memadai
4. Peralatan kesehatan yang perlu disempurnakan sesuai standar Rumah sakit.
5. Adanya pengembangan layanan baru yang belum terakomodir dalam Pergub Nomor 43 Tahun 2016 beserta perubahannya.
6. Adanya perubahan regulasi terkait perubahan tarif mitra layanan

**c. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program SDGs dan SPM.**

Secara umum hambatan dan permasalahan yang ada di RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dalam pencapaian SDGs tidak terlalu berpengaruh secara signifikan karena RS Jiwa Prof. HB. Saanin sebagai pendukung pencapaian SDGs hal ini dibuktikan dengan terbukanya akses pelayanan kesehatan penduduk miskin dengan diterapkannya Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS. Selain dari pada itu penanganan penderita dengan penyalahgunaan Napza melalui pelayanan pengobatan dan rehabilitasi, sementara untuk pencapaian SPM secara umum sudah tercapai dengan baik walaupun masih perlu ditingkatkan.

**d. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan di RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang**

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan di RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang antara lain:

- a. RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang merupakan satu-satunya rumah sakit khusus pemerintah dalam pelayanan kesehatan jiwa.
- b. RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang ditunjuk sebagai Institusi Pelayanan Wajib Lapor pecandu Napza.
- c. RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang juga sebagai Institusi Rehabilitasi Napza.
- d. RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang merupakan satu-satunya tempat praktek pendidikan khusus pelayanan kesehatan jiwa.
- e. RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang merupakan RS rujukan pasien Covid-19.
- f. Sebagai PPK BLUD RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang memiliki kesempatan untuk menjalankan praktek bisnis yang sehat dan keleluasaan penggunaan pendapatan operasional.
- g. Masih adanya lahan yang dapat digunakan dalam pengembangan atau pembangunan rumah sakit.
- h. RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang sudah mendapatkan akreditasi Paripurna

**e. Formula isu-isu penting berupa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun 2025.**

Isu-isu penting yang harus dijawab dalam meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan kesehatan jiwa, guna ditindak lanjuti dalam program dan kegiatan tahun 2025 sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya kepedulian dan pengetahuan dari SDM khususnya tenaga profesional dan tingginya tuntutan masyarakat yang mengharuskan SDM selalu mengembangkan diri.

**Catatan strategis:** Dalam melakukan pelayanan bekerja sama dengan tenaga spesialis RS dr. M.Djamil Padang, Begitu juga spesialis Radiologi, Spesialis Rehabilitasi Medis dari luar, untuk pelayanan lainnya mengoptimalkan SDM yang ada, salah satunya adalah tenaga dokter spesialis yang kendali ke RS setelah menyelesaikan pendidikannya.

- 2) Masih terdapat peralatan kedokteran yang rusak, begitu juga alat kesehatan Non Medis perlu penambahan dan penggantian yang rusak.

**Catatan strategis:** Mengupayakan perbaikan semua fasilitas pelayanan di lingkungan rumah sakit, serta mengoptimalkan pemakaian peralatan kesehatan yang ada sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik.

- Pemenuhan sarana dan prasarana pada Instalasi Napza masih kurang sehingga perlu penambahan untuk meningkatkan pelayanan

**Catatan Strategis:** meningkatkan layanan pasien jiwa maupun pasien non jiwa dengan memberdayakan tenaga dan sumberdaya yang ada di rumah sakit.

- Berdasarkan surat edaran dari BPJS Kesehatan tentang rujukan berjenjang mengakibatkan jumlah pasien rawat jalan menurun, hal ini disebabkan mulai berlakunya rujukan online berjenjang dimana pasien rawat jalan dirujuk dimulai dari RSUD kelas D,C, B, A.

**Catatan Strategis:** Melakukan efisiensi terhadap belanja BLUD RS Jiwa Prof.HB. Saanin padang agar dapat memenuhi target belanja

2024.

**f. Pencapaian Target Renstra SKPD berkaitan dengan RENJA SKPD Tahun-tahun sebelumnya.**

Pencapaian target renstra RS Jiwa Prof HB.Saanin Padang secara umum sudah cukup memadai sesuai target yang telah ditetapkan, namun demikian perlu meningkatkan capaian kinerja terhadap program dan kegiatan pada rencana kerja Tahun selanjutnya. Hal ini dapat dilihat pada Formulir E.55 sebagai berikut.

**FORMULIR E.55**

**Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi**

**RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN**

**Periode Pelaksanaan : Triwulan I 2025**

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)Kegiatan(ouput)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
				(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11						(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp	K	Rp	(16)	(17)
		RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN			306.614.000.000	66.415.483.131	70.849.554.000	13.768.283.234	0	0	0	0	13.768.283.234	19,43	80.183.766.365	26,15													
X		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	nan													
X.XX		PENUNJANG URUSAN			0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	nan													
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			306.614.000.000	66.415.483.131	70.849.554.000	13.768.283.234	0	0	0	0	13.768.283.234	19,43	80.183.766.365	26,15													
1.02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			306.614.000.000	66.415.483.131	70.849.554.000	13.768.283.234	0	0	0	0	13.768.283.234	19,43	80.183.766.365	26,15													
1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Persen	292.915.000.000	100 64.915.364.252	100 67.000.000.000	13.768.283.234	0	0	0	0	13.768.283.234	0,00 20,55	100 78.683.647.486	inf 26,86													
			Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	Persen		43,48	50	9,57					9,57	19,14	53,05	inf													
1.02.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	95 137.308.000.000	96,45 35.147.501.063	95 38.000.000.000	20,46 9.218.584.716	0	0	0	0	20,46 9.218.584.716	21,54 24,26	116,91 44.366.085.779	123,06 32,31													
1	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	285 137.308.000.000	33,5 35.147.501.063	335 38.000.000.000	335 9.218.584.716	0	0	0	335	9.218.584.716	100,00 24,26	368,5 44.366.085.779	129,30 32,31	RSJ SAANIN												
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			129,30	32,31									
Predikat Kinerja																			ST	SR									
1.02.01.1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Tingkat Kemandirian Keuangan (BLUD)	Persen	52 155.607.000.000	43,48 29.767.863.189	50 29.000.000.000	9,57 4.549.698.518	0	0	0	0	9,57 4.549.698.518	19,14 15,69	53,05 34.317.561.707	102,02 22,05													
2	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	52 155.607.000.000	12 29.767.863.189	1 29.000.000.000	1 4.549.698.518	0	0	0	1	4.549.698.518	100,00 15,69	13 34.317.561.707	25,00 22,05	RSJ SAANIN												
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			12,50	11,03									

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sid Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra sid Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah sid Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																			
Predikat Kinerja																				SR	SR																								
1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	12.913.000.000	94,91	1.500.118.879	89	3.688.402.000	94,91	0	0	0	0	94,91	0	106,64	0,00	189,82	1.500.118.879	inf	11,62																							
1.02.02.1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pencapaian standar fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persen	100	12.913.000.000	100	1.500.118.879	93	3.688.402.000	25	0	0	0	0	25	0	26,88	0,00	125	1.500.118.879	125,00	11,62																						
1	1.02.02.1.01.0002	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit	0	0	0	0	3	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	RSJ SAANIN																					
2	1.02.02.1.01.0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	3	2.962.000.000	0	0	1	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	0,00	0,00	RSJ SAANIN																					
3	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	247	8.251.000.000	29	1.500.118.879	25	1.188.402.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	29	1.500.118.879	11,74	18,18	RSJ SAANIN																						
4	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	4	1.700.000.000	0	0	1	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	0,00	0,00	RSJ SAANIN																					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				nan	nan																								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																							
											I	II	III	IV																																			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K					Rp																					
Predikat Kinerja																							-	-																									
1.02.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensi	Persen		786.000.000	60	0	50	161.152.000	4,55	0	0	0	0	4,55	0	9,10	0,00	64,55	0	inf	0,00																										
1.02.03.1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase SDM Kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensi	Persen	52	786.000.000	60	0	48	161.152.000	4,55	0	0	0	0	4,55	0	9,48	0,00	64,55	0	124,13	0,00																										
1	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	285	786.000.000	335	0	123	161.152.000	15	0	0	0	0	15	0	12,20	0	350	0	122,81	0,00	RSJ SAANIN																									
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							122,81	0,00																									
Predikat Kinerja																							ST	SR																									

Disusun  
 \_\_\_\_\_, 21-04-2025  
**RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**DIREKTUR,**

Dievaluasi  
 Padang, \_\_\_\_\_  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**Kepala**

**Medi Iswandi, STMM**

**g. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya program dan terpenuhinya target kinerja program/kegiatan**

1. Faktor penyebab tidak tercapainya target program kegiatan adalah:
  - a) Adanya kendala dalam klaim BPJS sehingga pendapatan RS tertunda.
  - b) Belum Optimalnya kepedulian dan pengetahuan dari SDM khususnya tenaga professional dan tingginya tuntutan masyarakat yang mengharuskan SDM selalu mengembangkan diri.
2. Faktor penyebab tercapainya target program kegiatan adalah:
  - a) Peningkatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat
  - b) Peningkatan kinerja yang sangat baik
  - c) Terlaksananya fungsi rumah sakit yang selalu memberikan pelayanan dan kepuasan Peningkatan yang terbaik
  - d) Peningkatan Tata Kelola Pelayanan BLUD.

**h. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra SKPD**

Capaian program Renstra SKPD Tahun 2025 rata-rata tercapai sesuai target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Tahun 2025, sehingga secara keseluruhan target Renstra pada tahun ke-4 tahun 2025 terpenuhi.

**i. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil.**

Berdasarkan uraian di atas, dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlunya optimalisasi pencapaian kinerja kegiatan pada Pengadaan sarana dan prasarana, yang salah satunya dilakukan dengan perencanaan yang baik, terutama pada kegiatan yang bersumber pada APBD.
2. Upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang sebagai PPK BLUD RSUD dapat dilakukan antara lain melalui:

- a. Perencanaan program dan kegiatan secara lebih mantap serta dengan menggunakan manajemen resiko sehingga tidak akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya.
- b. Perlunya upaya-upaya peningkatan pelayanan dibidang kesehatan jiwa melalui promosi dan penyuluhan terhadap masyarakat.
- c. Peningkatan kompetensi SDM khususnya terkait dengan proses peningkatan pelayanan kesehatan Jiwa prima.
- d. Perlunya upaya-upaya peningkatan diklat yang mantap melalui kegiatan perencanaan kebutuhan diklat yang dibutuhkan.
- e. Peningkatan sarana dan prasarana dalam memenuhi standar peralatan tipe Rumah Sakit.
- f. Mengembangkan pelayanan RS Non Kejiwaan (Penyakit Dalam, Anak, Syaraf, dan Rehab Medik).
- g. Melakukan efisiensi di belanja BLUD dengan memprioritaskan proses belanja.
- h. Koordinasi dengan Kab/Kota terkait pembayaran Piutang Pasien Dinsos.
- i. Koordinasi dengan Kab/Kota terkait rujukan pasien jiwa.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD**

Rancangan perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat untuk RKPD RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Tahun 2025 yang akan menjadi usulan pada Musrenbang Provinsi Sumatera Barat. Proses review rancangan awal RKPD berguna untuk menggali dan mengakomodir program yang telah dirancang dapat memenuhi kebutuhan SKPD dalam mencapai target Renstra dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat, apabila diperlukan untuk percepatan capaian program dapat diusulkan penambahan sesuai dengan kebutuhan tersebut.

Setelah dilakukan review terhadap rancangan perubahan RKPD, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang akan melanjutkan rancangan perubahan RKPD tersebut.

**Tabel T-C.31**  
**Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025**  
**Provinsi Sumatera Barat**

**Nama SKPD : RS. Jiwa prof. HB.Saanin Padang**

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kota Padang	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	67,286,126,181	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kota Padang	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	67,286,126,181	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Padang	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	95%	38,411,126,181	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Padang	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	95%	38,411,126,181	
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	100%	38,411,126,181	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	100%	38,411,126,181	
2	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Padang	Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	50%	28,875,000,000	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Padang	Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	46%	28,875,000,000	
a	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Padang	Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	50%	28,875,000,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Padang	Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	12 Bulan	28,875,000,000	
II	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kota Padang	IKM	89%	-	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kota Padang	IKM	88%	-	
2	Penyediaan Fasilitas, Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kota Padang	Persentase pencapaian standar fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	0 Unit	-	Penyediaan Fasilitas, Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kota Padang	Persentase pencapaian standar fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	23 Unit	-	
a	Pengembangan Rumah Sakit	Kota Padang	Jumlah fasilitas pengembangan RS yang terbangun	0 Unit	-	Pengembangan Rumah Sakit	Kota Padang	Jumlah fasilitas pengembangan RS yang terbangun	0 Unit	-	
b	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Padang	Jumlah pengembangan fasilitas kesehatan lainnya yang terbangun	0 Unit	-	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Padang	Jumlah pengembangan fasilitas kesehatan lainnya yang terbangun	0 Unit	-	
c	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Kota Padang	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik yang tersedia	0 Unit	-	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Kota Padang	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik yang tersedia	23 Unit	-	
3	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kota Padang	Terlaksananya layanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	0	-	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kota Padang	Terlaksananya layanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	0	-	
a	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Kota Padang	Terlaksananya pembayaran insentif tenaga kesehatan	0	-	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Kota Padang	Terlaksananya pembayaran insentif tenaga kesehatan	0	-	
b	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Kota Padang	Terselenggaranya layanan konseling	0	-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Kota Padang	Terselenggaranya layanan konseling	0	-	
<b>TOTAL</b>					<b>67,286,126,181</b>					<b>67,286,126,181</b>	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai SKPD dengan tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kesehatan rujukan khususnya kesehatan jiwa baik yang sifatnya perorangan atau masyarakat, peran serta masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

**Tabel T-C.32.**  
**Usulan Program Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025**  
**Provinsi Sumatera Barat**

No	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ volume	Catatan ***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Program Penunjang Pemerintah Daerah Provinsi / Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD	Padang			
	Program Pelayanan dan Penunjang BLUD	Padang	Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang BLUD	Rp. 28.750.000.000	
	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Padang	IKM		

*Sumber: Hasil jaring aspirasi/usulan masyarakat.*

Adapun usulan program kegiatan yang terkait dengan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Biro Perekonomian sebagai pembina BLUD mengatakan bahwa RS BLUD itu harus mandiri artinya pun tidak bisa lepas dari APBD, bukan untuk mencari keuntungan tapi untuk perbaikan pelayanan.
2. Mensosialisasikan ke masyarakat terkait peningkatan informasi publik.

3. Mensosialisasikan ke masyarakat terkait pelayanan anak dan remaja seperti gangguan belajar, autism, layanan Napza, dll.
4. Usulan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang terakreditasi menjadi Akreditasi RS Pendidikan, bukan hanya untuk Pendidikan Kedokteran, tapi juga profesi lainnya.
5. BNN Provinsi Sumatera Barat, bukan hanya penangkapan tapi termasuk pembinaan, penguatan lembaga organisasi dan masyarakat. RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang satu-satunya yang memiliki Rawat Inap, permasalahan di lapangan banyak ditemukan permasalahan hukum. Pecandu wajib melaporkan diri dan direhabilitasi di RS dan penyalahgunaan akan ditindak dengan aturan hukum.
6. Diharapkan adanya integrasi dan koordinasi antara RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang, Dinas Sosial dan DUK Capil untuk data kependudukan ODGJ (Orang dengan gangguan jiwa).
7. Untuk meningkatkan pendapatan, perlu ditingkatkan layanan potensial seperti rawat inap psikiatri, rawat inap Napza.
8. Sosialisasi Pelayanan Non Jiwa ke masyarakat, agar masyarakat mengetahui kalau di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang tidak hanya melayani pasien jiwa tapi juga melayani pasien non jiwa.
9. Diharapkan upaya dari pihak RS.Jiwa Prof. HB. Saanin Padang terkait permasalahan lingkungan, Fokus pada peningkatan kesejahteraan Masyarakat, ada beberapa perumahan diluar RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang merehab pasien.
10. Kegiatan pengembangan RS, ada beberapa lokasi lahan kosong, kami bermaksud memanfaatkan sesuai dengan arahan camat. Tempat tsb terpisah dari lokasi RSJ dan ditumbuhi semak belukar dan sampah.
11. Permasalahan Pemagaran, kami berharap solusi keamanan NAPZA, agar akses tersebut dibuka dan pembuatan Pos Security (diperkuat).
12. UKM perlu kerjasama lingkungan sekitar, dan jika ada kebutuhan SDM di RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang agar diprioritaskan warga sekitar RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang.

13. Pelayanan kesehatan di rumah sakit ditambah atau diperluas jenisnya dengan menyesuaikan perkembangan kasus penyakit yang dialami masyarakat.
14. Tetap memberikan pelayanan kesehatan yang optimal pada masyarakat miskin.
15. Melibatkan masyarakat dalam sosialisasi dan informasi melalui dialog interaktif penyuluhan tentang kesehatan jiwa baik di rumah sakit, media cetak maupun media elektronik.
16. Melaksanakan *home visite* untuk pasien dengan kasus-kasus tertentu dan pemulangan/penguburan pasien miskin yang tidak dijemput keluarga.

**BAB III**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini memuat program kerja, kegiatan, sasaran beserta indikatornya yang akan dilaksanakan oleh RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Provinsi Sumatera Barat. Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dapat dilakukan pengawasan dan evaluasi kinerja sehingga program dan kegiatan berhasil dilaksanakan.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, Program yang ada berjumlah 3 program didukung dengan 4 Kegiatan dengan 6 sub kegiatan. Penyebaran lokasi kegiatan adalah 6 sub kegiatan berlokasi di Padang (RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang).

Total kebutuhan dana/pagu indikatif pada Tahun Anggaran 2025 dibutuhkan dana sebesar Rp. 67.286.126.181,-.

Rencana program dan kegiatan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 14 dibawah ini:.

**Tabel. 14**  
**Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2024**

<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Rincian Sub Kegiatan</b>
<b>I</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi</b>	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD	
<b>II</b>	<b>Program Pemenuhan Upaya</b>	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan Alat Kesehatan	Pengembangan Rumah Sakit	Pembangunan pagar lingkungan RS

	<b>Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Rehab Gedung Instalansi Rehabilitasi Mental
			Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan kesehatan	Pengadaan alat kesehatan DBHCHT
				Pengadaan alat kesehatan DAK
				Pengadaan BM alat Kesehatan
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Inhouse Training
				Bimtek, Seminar, Lokakarya

Sedangkan Indikasi Rencana Kerja dan Pendanaan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel. 15**  
**Usulan Program dan Kegiatan RS Jiwa Prof HB Saanin Padang Tahun 2025**  
**Provinsi Sumatera Barat**

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>					
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>					
<b>I</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>Padang</b>	<b>Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	
	<b>A Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Padang</b>	<b>Persentase Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>95%</b>	
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Padang	Jumlah Pegawai/ASN/P3K yang menerima gaji dan tunjangan	335 Orang	
	<b>B Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Padang</b>	<b>Persentase pencapaian standar fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>		
	1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Padang	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	
	<b>C Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>Padang</b>	<b>Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan</b>	<b>50%</b>	
	1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Padang	Jumlah Bulan Operasional	12 Bulan	
<b>II</b>	<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>Padang</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>89%</b>	
	<b>A Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Padang</b>	<b>Persentase Pencapaian Standar Fasilitas Pelayanan, sarana Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>93%</b>	
	<b>I Pengembangan Rumah Sakit</b>	<b>Padang</b>	<b>Jumlah RS yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan RS yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000</b>	<b>1 Unit</b>	
	1 Pembangunan Selasar Utama Penghubung Antar Ruangan RS	Padang	Tersedianya selasar utama penghubung antar ruangan RS	1 Unit	
	<b>II Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit</b>	<b>Padang</b>	<b>Terpeliharanya Fasilitas Gedung RS</b>	<b>1 Unit</b>	
	1 Rehab Gedung Instalasi Rehabilitasi Mental (Psikososial)	Padang	Gedung Instalasi Rehabilitasi Mental yang direhab	1 Unit	
	<b>III Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan</b>	<b>Padang</b>	<b>Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang disediakan</b>		
	1 Pengadaan Alat Kesehatan DBHCHT	Padang	Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan DBHCHT	100%	
	2 Pengadaan Alat Kesehatan DAK/APBD (Ambulance 2 unit)	Padang	Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan DAK	100%	
	3 Pengadaan BM Alat Kesehatan (Ruangan ICU/HCU=O2 Sentral)	Padang	Terlaksananya Pengadaan BM Alat Kesehatan BLUD	100%	
	<b>B Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Padang</b>	<b>Terlaksananya layanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>100%</b>	
	<b>I Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana</b>	<b>Padang</b>	<b>Terseleenggaranya layanan konseling</b>	<b>100%</b>	
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>	<b>Padang</b>	<b>Persentase SDM Kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensi</b>	<b>48%</b>	
	<b>A Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Padang</b>	<b>Persentase SDM kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensi persentase pencapaian pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM Kesehatan tingkat daerah provinsi</b>	<b>48%</b>	
	<b>I Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>	<b>Padang</b>	<b>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat</b>	<b>123 Orang</b>	
	1 InHouse Training	Padang	Terlaksananya InHouse Training	100 Orang	
	2 Bimtek, Seminar, Lokakarya	Padang	Terlaksananya Bimtek, Seminar, Lokakarya	23 Orang	

**Tabel. 16**  
**Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025**  
**dan Perkiraan Maju Tahun 2026**  
**Provinsi Sumatera Barat**

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000,-)	Prioritas	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp.000,-)	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
I	Program Penunjang Usuran Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase pemenuhan penunjang usuran Pemerintah Daerah	Padang	100%	67,286,126				47,067,000	
A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		95%	38,411,126		DAU	Operasional	95%	19,800,000
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai/ASN/P3K yang menerima gaji dan tunjangan	Padang	335 Orang	38,411,126	P2	DAU	Operasional	335 Orang	19,800,000
B	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Persentase pencapaian standar fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			-					
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Padang	1 Unit	-		DAU	Operasional		-
C	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan	Padang	50%	28,875,000		BLUD	Operasional	50%	27,267,000
1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Bulan Operasional	Padang	12 Bulan	28,875,000	P2	BLUD	Operasional	12 bulan	27,267,000
II	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Padang	89%	-		APBD	investasi	88%	2,264,981
A	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pencapaian Standar Fasilitas Pelayanan, sarana Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Padang	93%	-		APBD			2,264,981
I	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah RS yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan RS yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000	Padang		-		APBD	investasi	1 Unit	500,000
1	Pembangunan Selasar Utama Penghubung Antar Ruangan RS	Tersedianya selasar utama penghubung antar ruangan RS	Padang				APBD	Investasi	1 Unit	500,000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000,-)	Prioritas	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kabutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp.000,-)
II	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya yang terbangun	Padang		-		investasi		-
2	Pembangunan Pengembangan Sarana Air Bersih	Terbangunnya Pengembangan Sarana Air Bersih	Padang			APBD	Investasi	100%	-
III	Pengembangan Rumah Dinas Tenaga kesehatan	Jumlah pengembangan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan			-		investasi		-
1	Pengembangan Rumah Dinas	Terbangunnya pengembangan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Padang			APBD	Investasi	100%	-
IV	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit	Padang		-	APBD	investasi		-
1	Rehab Gedung Instalasi Rehabilitasi Mental (Psikososial) (DED BLUD)	Terlaksananya Rehab Gedung Instalasi Rehabilitasi Mental (Psikososial) yang direhab	Padang			APBD	Investasi		-
V	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang disediakan	Padang		-		investasi	100%	1,764,981
1	Pengadaan Alat Kesehatan DBHCHT	Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan DBHCHT	Padang		-	APBD	Investasi	100%	264,981
2	Pengadaan Alat Kesehatan DAK/APBD	Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan DAK	Padang		-	APBD	Investasi	100%	1,500,000
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensi	Padang		-	APBD	Operasional	100%	168,871
A	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase SDM kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensi persentase pencapaian pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM Kesehatan tingkat daerah provinsi	Padang		-	APBD	Operasional		168,871
I	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Padang		-	APBD	Operasional	123 Orang	168,871
1	InHouse Training	Terlaksananya InHouse Training	Padang		-	APBD	Operasional	100 Orang	68,871
2	Bimtek, Seminar, Lokakarya	Terlaksananya Bimtek, Seminar, Lokakarya	Padang		-	APBD	Operasional	23 Orang	100,000





## **BAB IV PENUTUP**

Rencana kerja perubahan SKPD RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Tahun Anggaran 2025 disusun dengan berpedoman kepada RPJMN 2025-2029, Renstra 2022-2026 Kementerian Kesehatan RI, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat 2021–2026 dan Rencana Strategis (Renstra) RS Jiwa Prof. HB. Saanin 2022 – 2026.

Hal – hal yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan Renja Tahun 2025 adalah.

1. Pelayanan pasien yang tidak mampu harus ada koordinasi dan sinkronisasi antara program yang dilaksanakan di provinsi dengan program kab/kota, dalam hal pembiayaan maupun tindak lanjut setelah pasien dikembalikan ke masyarakat.
2. Pemerintah Provinsi bersama dengan pemerintah kab/kota menyediakan rumah singgah/panti rehabilitasi untuk pasien yang dipulangkan dari rumah sakit jiwa.
3. Harus ada program/kegiatan untuk penanganan pasien pasung di dalam APBD provinsi dan kab/kota.
4. Meningkatkan penyuluhan dan promosi pelayanan kesehatan jiwa dan penanganan masalah korban NAPZA.
5. Meningkatkan kerja sama lintas sektor untuk penanganan rehabilitasi sosial dan rehabilitasi korban Napza.
6. Perlu peningkatan kemandirian Rumah Sakit melalui peningkatan pelayanan BLUD sehingga kegiatan yang belum tertampung dalam APBD dapat direalisasikan dalam BLUD.
7. Peningkatan pelayanan untuk peserta magang dan praktik mahasiswa kesehatan yang setiap tahun terus bertambah, sehubungan RS Jiwa Prof.HB Saanin sebagai rumah sakit pelayanan kesehatan jiwa di Sumatera Barat.

Peningkatan dan pengembangan pembangunan Rumah Sakit Jiwa Prof.

HB. Saanin Padang baik fisik maupun pengembangan sumber daya manusia disesuaikan dengan permasalahan kesehatan di masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi.

Pelaksanaan Rencana kerja tahun 2025 perlu memperhatikan kaidah-kaidah yang ada pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan mengedepankan asas manfaat, berkeadilan, akuntabel dan transparansi.

Rencana tindak lanjut bila penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini disetujui maka perlu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh guna meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa dan apabila tidak terakomodir seluruhnya maka perlu dicarikan jalan keluar dengan mengoptimalkan anggaran yang telah ditetapkan.

Rencana kerja perubahan Tahun Anggaran 2025 ini telah disusun dengan sebaik-baiknya yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Sumatera Barat khususnya masalah kesehatan jiwa, namun masih ada terdapat kekurangan dan kelemahannya, untuk kesempurnaan rencana kerja ini kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak.